

## **DASAR HUKUM PPID SMAN 68 JAKARTA**

Dasar hukum PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di SMAN 68 Jakarta berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang umumnya berlaku:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**
  - UU ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak publik untuk mengakses informasi dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
  - Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan UU KIP, termasuk mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik**
  - Peraturan ini menetapkan standar pelayanan informasi publik yang harus dipatuhi oleh badan publik termasuk sekolah.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**
  - Peraturan ini mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan yang mencakup pengelolaan informasi dan dokumentasi di sekolah.
- 5. Peraturan Kepala Sekolah atau Kebijakan Internal**
  - SMAN 68 Jakarta memiliki kebijakan atau peraturan internal yang spesifik untuk mengatur pelaksanaan PPID di tingkat sekolah.
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
  - Meskipun lebih umum, undang-undang ini juga berperan dalam kerangka hukum yang mengatur pengelolaan informasi dan dokumentasi di lembaga pendidikan di daerah.
- 7. Peraturan Daerah dan Peraturan Dinas Pendidikan:**

<https://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid>